

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ada 2 (dua) hal yang berkaitan dengan keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara memiliki 5 (lima) siklus utama yang harus dilakukan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan siklus awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus selanjutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD.

Pelaksanaan anggaran merupakan siklus ketiga yang diwujudkan dalam eksekusi anggaran yang di dapat maupun belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN/APBD dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dalam lingkungannya. Pertanggungjawaban merupakan siklus terakhir yang juga sangat penting dengan siklus-siklus sebelumnya. Sejatinya, pertanggungjawaban merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Masyarakat dan semua pihak tentunya menginginkan pertanggungjawaban yang berkualitas atas penggunaan dana yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintahan.

Laporan keuangan yang disusun oleh entitas wajib mengikuti prinsip-prinsip sesuai pedoman standar akuntansi yang berlaku menurut Indriyanto & Cahyani, (2022). Laporan keuangan adalah laporan yang menguraikan posisi

keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor, sehingga membantu pengguna membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah secara khusus dibuat untuk membantu pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang diberikan kepadanya. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Ini membantu pengguna membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya.

Siklus laporan keuangan pemerintahan berada pada akhir siklus pengelolaan keuangan negara, namun perannya amat penting sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media dari proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan dana publik. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya. Untuk itu diperlukannya peningkatan peranan Laporan Keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari Laporan Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan terutama aturan yang digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi seberapa efektif dan efisien suatu entitas pelaporan, dan membantu mengetahui seberapa taatnya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik yang dikelola secara baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas baik

menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Bahri, 2016: 71).

Permasalahan yang sering terjadi pada siklus perencanaan adalah kurangnya rencana kerja dan anggaran yang disusun secara kolaboratif dan terkoordinasi dan juga minimnya pemahaman yang didapat tentang perencanaan anggaran pemerintahan daerah. Pada siklus pelaksanaan, permasalahan yang sering terjadi adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, sehingga sering terjadi penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat sehingga dapat merugikan masyarakat. Kualitas Laporan keuangan yang tidak akurat dan andal dapat menjadi penyebab pengambilan putusan yang keliru serta dapat menghambat perencanaan anggaran jangka menengah bahkan panjang serta menghambat pencapaian target-target perencanaan.

Fenomena yang sering terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Kelurahan wilayah Kecamatan Pasar Minggu adalah masih terdapat perbedaan pemahaman antar OPD terkait dengan kelengkapan data yang dikumpulkan sehingga dapat menyebabkan tidak akuratnya informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan, hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian internal yang masih kurang optimal dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran daerah yang akan menyebabkan tidak transparannya informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Maka permasalahan yang dapat disimpulkan adalah terdapat hambatan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada Pemerintahan Daerah OPD Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

Upaya yang nyata dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem untuk memperoleh informasi akuntansi sering digunakan entitas untuk memberikan keputusan, mengetahui kondisi laporan keuangan organisasi yang efektif. Sistem informasi akuntansi, menurut Bodnar dan Hopwood (2012), adalah kumpulan sumber daya yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi.

Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam kepentingan pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan akan membuat keputusan teknis dan nonteknis dengan menggunakan data dari sistem informasi akuntansi.

Sistem pengendalian internal adalah faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Valery G Kumaat (2011), definisi pengendalian internal (SPI) adalah salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. SPI berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual). Fungsi dari dilaksanakan pengendalian internal menurut Romney (2014:227) adalah yang pertama untuk pengendalian preventif, yaitu untuk tindakan melakukan pengendalian internal sebelum suatu masalah itu muncul.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) tertera pada Undang-Undang No.60 2008. Penjelasan SPIP yaitu pelaksanaan menurut lingkungan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila pengendalian internal digunakan dengan benar, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Kegiatan yang melanggar peraturan dapat dicegah dengan penerapan SPI sebagai sistem yang efektif. (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Pemahaman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah mengacu pada standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan pemerintah. . Akibatnya, SAP adalah keharusan yang memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. SAP digunakan di semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi terkait lainnya.

Penelitian sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal diteliti oleh Chodijah & Hidayah (2018) , (Udiyanti & Pramuka, 2020) , Rohmah et al., (2020) , Lestari & Dewi (2020), Sihasale et al.,

(2020), dan Nasution et al., (2024) menemukan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Syafrudin et al., (2021), Ningrum (2018), Hama et al., (2021), dan Goo & Lamawitak (2021) menemukan hasil penelitian bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ditemukan dalam penelitian Afifah et al., (2021), Lesmana (2021), Ikriyati & Aprila (2019) dan Hasdiana (2018). Hasil berbeda ditunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Atharrizka et al., 2021) dan (Triyono, B. S., & Dewi, S. N. 2020).

Lebih lanjut, *research gap* penelitian ini disajikan sederhana dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1. 1 Research Gap

<i>Research GAP</i>	Hasil Penelitian	Peneliti
Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (X1) terhadap kualitas laporan keuangan	Berpengaruh	(Chodijah & Hidayah, 2018) , (Uviyanti & Pramuka, 2020) , (Rohmah et al., 2020) , (Lestari & Dewi, 2020), (Sihasale et al., 2020), dan (Nasution et al., 2024)
	Tidak Berpengaruh	(Syafrudin et al., 2021), (Khoirina Kencana Ningrum 2018), (Hama et al., 2021), dan (Emilianus Eo Kutu Goo & Paulus Libu Lamawitak, 2021)
Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap kualitas laporan keuangan	Berpengaruh	(Afifah et al., 2021), (Lesmana, 2021), (Ikriyati & Aprila, 2019) dan (Hasdiana, 2018)
	Tidak Berpengaruh	(Atharrizka et al., 2021) (Triyono, B. S., & Dewi, S. N. 2020)

Sumber : Data diolah Oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan uraian latar belakang yang terjadi serta beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki hasil yang berbeda-beda, penelitian ini merupakan modifikasi dan pengembangan dengan menggunakan variable-variabel independen

yang menghubungkan antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu?
3. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu?
4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu.

- b. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu.
- c. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi.
- d. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Minggu dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini maka dapat menambah terciptanya wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi terutama mengenai teor yang mendasari penelitian ini, yaitu sistem informasi keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintahan yang baik.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Instansi Pemerintah

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini maka pihak instansi satuan kerja di bidang keuangan khususnya OPD kelurahan dapat dijadikan sebagai masukan/saran dan informasi tambahan untuk meningkatkan pengetahuan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, serta pemahaman standar akuntansi pemerintahan sehingga dapat membuat laporan keuangan yang baik dimasa yang akan datang.

2) Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

3) Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan sebagai bahan acuan dasar referensi untuk pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema sejenis dan dapat melakukan pengembangan terkait dengan tema yang sama.

